

**PENERAPAN PRINSIP AKUNTABILITAS DAN  
TRANSPARANSI DALAM PEMBERIAN BANTUAN  
KEBAKARAN PERMUKIMAN OLEH DINAS SOSIAL  
KABUPATEN OGAN ILIR DI KECAMATAN PEMULUTAN  
TAHUN 2021**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan  
Dalam Memenuhi Derajat Sarjana S-1  
Ilmu Administrasi Publik**



**Oleh :**

**RESFINA ANANDARIA  
NIM. 07011181823032**

**Konsentrasi Kebijakan Publik**

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
2022**

## **HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI**

### **"PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* DALAM PELAYANAN KORBAN KEBAKARAN OLEH DINAS SOSIAL, KABUPATEN OGAN ILIR DI KECAMATAN PEMULUTAN TAHUN 2021"**

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan dalam Menempuh Derajat Sarjana  
S-1 Ilmu Administrasi Publik**

**Oleh:**

**RESFINA ANANDARIA**

**NIM. 07011181823032**

**Pembimbing I**

**Ermanovida S.Sos., M. Si.**

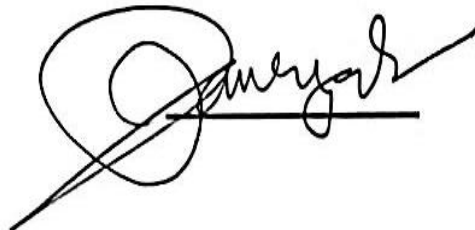
**NIP. 196911191998032001**



**Pembimbing II**

**Januar Eko Aryansah, S.IP., S.H., M.Si.**

**NIP. 198801272019031005**



**Mengetahui,**

**Ketua Jurusan**



**Dr. Muhammad Nur Budiyanto, S. Sos., MPA.**

**NIP. 196911101994011001**

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

**"PENERAPAN PRINSIP AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI  
DALAM PEMBERIAN BANTUAN KEBAKARAN PERMUKIMAN  
OLEH DINAS SOSIAL KABUPATEN OGAN ILIR DI KECAMATAN  
PEMULUTAN TAHUN 2021"**

Skrripsi

Oleh :

**RESFINA ANANDARIA**

**NIM. 07011181823032**

Telah dipertahankan di depan penguji

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Pada tanggal 18 JULI 2022

Pembimbing :

1. Ermanovida, S.Sos., M.Si  
NIP.196911191998032001

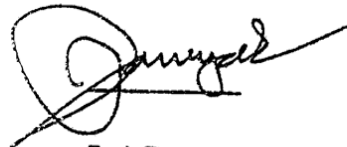
2. Januar Eko Aryansah, S. IP., S.H., M.Si  
NIP. 198801272019031005

Penguji :

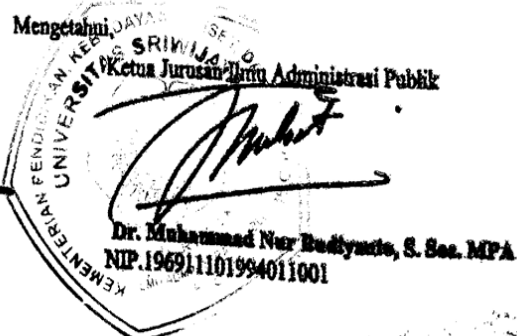
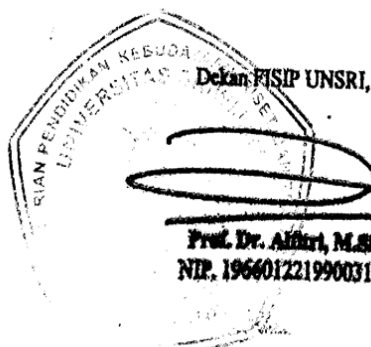
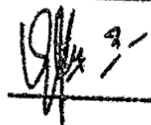
1. Dr. Lili Erina, M. Si  
NIP. 196612311993031018

2. Dr. Nengyanti, M. Hum  
NIP.196704121992032002

Tanda Tangan



Tanda Tangan



## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

***“Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur, sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan”***

*(Mazmur 37:37)*

**Atas Rahmat Tuhan Yang Maha Kasih,  
Skripsi ini saya persembahkan untuk:**

- 1. Keluargaku Tercinta, Bapak Firman Tumanggor, Ibu Resi Sianturi dan Kakak serta Abangku.**
- 2. Sahabatku, Gunar, Nisak, Cibon, Nabila dan Natasha.**
- 3. Teman-Teman seperjuanganku jurusan Ilmu Administrasi Publik 2018.**
- 4. Almamaterku, Universitas Sriwijaya.**

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Resfina Anandaria  
NIM : 07011181823032  
Tempat dan Tanggal Lahir : Teratai/ 02 Oktober 2000  
Program Studi/Jurusan : Ilmu Administrasi Publik  
Judul Skripsi : Penerapan Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pemberian Bantuan Kebakaran Permukiman oleh Dinas Sosial Kabupaten Ogan Ilir di Kecamatan Pemulutan Tahun 2021

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan yang disajikan dalam karya ilmiah ini, kecuali yang disebutkan sumbernya adalah merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan serta pemikiran saya dengan pengarahan dari pembimbing yang ditetapkan
2. Karya ilmiah yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik di Universitas Sriwijaya maupun di perguruan tinggi lainnya.

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ditemukan bukti ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh melalui pengajuan karya ilmiah

Palembang, 28 Agustus 2022  
Yang membuat pernyataan



Resfina Anandaria  
NIM. 07011181823032

## ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Penerapan Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pemberian Bantuan Kebakaran Permukiman oleh Dinas Sosial Kabupaten Ogan Ilir di Kecamatan Pemulutan Tahun 2021”. Penelitian ini menggunakan konsep dari Sedarmayanti mengenai prinsip Akuntabilitas dan Transparansi dan menggunakan indikator penilaian yang dikemukakan oleh BAPPENAS. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pemberian bantuan kebakaran permukiman oleh Dinas Sosial Kabupaten Ogan Ilir di Kecamatan Pemulutan dilakukan. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pemberian bantuan kebakaran permukiman oleh Dinas Sosial Kabupaten Ogan Ilir di Kecamatan Pemulutan Tahun 2021 belum memenuhi kriteria, hal ini dilihat dari adanya pemenuhan akan kebutuhan dasar yang harus diberikan oleh Dinas Sosial Kabupaten Ogan Ilir di Kecamatan Pemulutan yang belum terpenuhi secara keseluruhan dan terjaminnya hak untuk memperoleh informasi secara valid dan terbuka belum dijamin kepastiannya. Saran yang berkaitan dengan temuan hasil penelitian ini adalah Dinas Sosial Kabupaten Ogan Ilir perlu melakukan disiplin dan juga pengawasan yang ketat pada pelaksanaan pemberian bantuan ini agar tetap memperhatikan penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam setiap prosesnya sehingga pemberian bantuan ini dapat terlaksana dengan optimal dan efektif.

**Kata Kunci:** Akuntabilitas, Transparansi, Kebakaran, Dinas Sosial, Kecamatan Pemulutan.

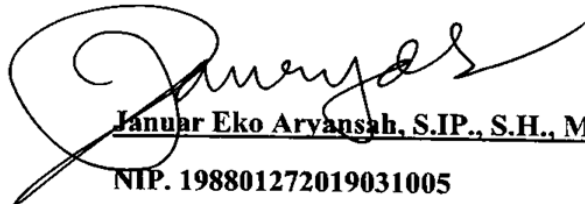
**Pembimbing I**



Ermanovida, S. Sos., M. Si.

NIP. 19691191998032001

**Pembimbing II**



Januar Eko Aryansah, S.IP., S.H., M. Si.

NIP. 198801272019031005

**Indralaya, 28 Agustus 2022**

**Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik**

**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

**Universitas Sriwijaya**



Dr. Muhammad Nur Budiyo, S. Sos., MPA.

NIP. 196911101994011001

## **ABSTRACT**

*This research is entitled "Application of the Principles of Accountability and Transparency in Providing Settlement Fire Assistance by the Social Service of Ogan Ilir Regency in Pemulutan District in 2021". This study aims to determine the application of the principles of good governance in the service of fire victims by the Social Service of Ogan Ilir Regency in Pemulutan District. The research method used in this study is a qualitative descriptive method. Sources of data obtained from primary data and secondary data, data collection through observation, interviews, and documentation. This study uses the concept of Sedarmayanti regarding the principles of Accountability and Transparency and uses the assessment indicators proposed by BAPPENAS. The results of this study indicate that the application of the principles of accountability and transparency in the service of fire victims by the Social Service of Ogan Ilir Regency in Pemulutan District has not been good, this can be seen from the fulfillment of basic needs that must be provided by the Social Service of Ogan Ilir Regency in Pemulutan District, and guaranteed their right to obtain valid and open information is not necessarily certain.*

**Keywords:** *Accountability, Transparency, Fire, Social Service, Pemulutan District.*

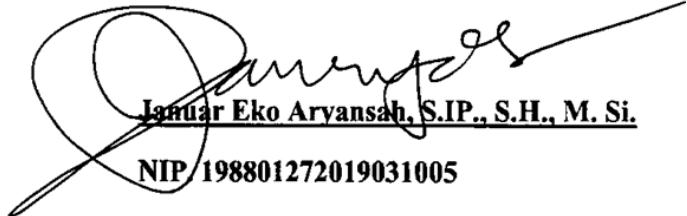
**Advisor I**



**Ermanovida, S. Sos., M. Si.**

**NIP. 19691191998032001**

**Advisor II**



**Januar Eko Aryansah, S.IP., S.H., M. Si.**

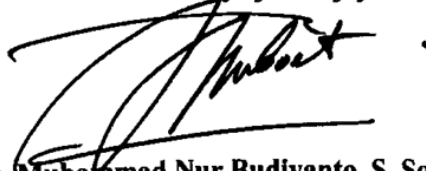
**NIP. 198801272019031005**

**Indralaya, 23 August 2022**

**Chairman of Department Public Administration**

**Faculty of Social and Political Science**

**University of Sriwijaya**



**Dr. Muhammad Nur Budiyanto, S. Sos., MPA.**

**NIP. 196911101994011001**

## KATA PENGANTAR

Tiada kata yang paling indah selain rasa puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas anugerah dan kasih karunia serta penyertaanNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Penerapan Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pemberian Bantuan Kebakaran Permukiman oleh Dinas Sosial Kabupaten Ogan Ilir di Kecamatan Pemulutan Tahun 2021”**. Skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana S-1 pada Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa dapat terselesaikannya skripsi ini tidak lepas dari dukungan semangat, bantuan, bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak. Sehingga dari hambatan, kendala dapat dilewati oleh penulis. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang sudah mendampingi penulis dalam proses penyusunan skripsi ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Orang tuaku tersayang, Ayahanda Firman Tumanggor dan Ibunda Resi Sianturi yang selalu mendoakan, memberikan dukungan semangat, memberikan motivasi bahkan materi kepada penulis. Serta terima kasih juga kepada Kakak-kakak dan abangku terkasih, Anaria Tumanggor, Nova Santaria Tumanggor, Erik Tumanggor dan Saut Wardiman Tumanggor yang selalu memberikan dukungan semangat.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE., selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Muhammad Nur Budiyanto, S.Sos., MPA., selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Universitas Sriwijaya.
5. Ibu Dr. Nurmah Semil, M. Si., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan semangat dari mulai masuk di bangku perkuliahan hingga dalam proses pengerjaan skripsi ini.
6. Ibu Ermanovida, S.Sos., M.Si selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia memberikan waktu untuk membimbing, memberikan masukan, memotivasi serta mengajari penulis dengan rela dan tulus selama proses penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Januar Eko Aryansah, S.IP., S.H., M.Si selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan waktu untuk membimbing, memberikan masukan, mengajari penulis dengan rela dan tulus selama proses penyusunan skripsi ini.
8. Seluruh Dosen Pengajar Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya yang telah berjasa memberikan pengajaran dalam ilmu dan pengetahuan serta pengalaman kepada penulis selama masa perkuliahan dan Seluruh Staff dan pegawai Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya telah memberikan bantuan kepada penulis dalam masa perkuliahan.
9. Mba Ades dan Mba Ita selaku admin jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya yang telah membantu saya dalam urusan administrasi selama penulisan skripsi ini.



10. Uda Budi Saputra, selaku Koordinator Lapangan TAGANA Kabupaten Ogan Ilir yang sudah banyak membantu saya dalam penelitian ini.
11. Bapak Kepala Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Ogan Ilir yang telah bersedia menjadi informan dalam penelitian ini.
12. Mba Iin Sugita selaku Tenaga Kerja Sosial (TKS) yang telah banyak membantu saya selama penulisan skripsi ini.
13. Bapak Camat kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir sebagai informan dalam penelitian ini.
14. Masyarakat kecamatan Pemulutan sebagai informan dalam penelitian ini.
15. Sahabatku, Gunar Winarto, Cibon, Nisak, dan juga Natasa serta Nabila.
16. Teman-teman seangkatanku yakni angkatan 2018 jurusan Ilmu Administrasi Publik, yang sudah memberikan doa dan juga semangat serta memberikan kenangan indah semasa perkuliahan saya.

Skripsi ini disusun agar pembaca dapat mengetahui mengenai “Penerapan Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pemberian Bantuan Kebakaran Permukiman oleh Dinas Sosial Kabupaten Ogan Ilir di Kecamatan Pemulutan Tahun 2021”. Penulis juga mengharapkan kritik dan saran dari pembaca agar kedepannya dapat lebih baik lagi penulisannya.

Akhir kata penulis ucapkan terima kasih.

Indralaya, 28 Agustus 2022  
Penulis



**Resfina Anandaria**

## DAFTAR ISI

	Halaman
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iii
ABSTRAK .....	iv
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR TABEL .....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xii
DAFTAR SINGKATAN .....	xiii
BAB I .....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	10
BAB II .....	12
TINJAUAN PUSTAKA .....	12
A. Landasan Teori .....	12
1. Kebijakan Publik .....	12
2. <i>Good Governance</i> .....	15
a. Prinsip-Prinsip <i>Good Governance</i> .....	17
3. Bantuan Kebakaran Permukiman .....	22
c. Penelitian Terdahulu .....	27
d. Kerangka Pemikiran .....	36
BAB III .....	37
METODOLOGI PENELITIAN .....	37
A. Jenis Penelitian .....	37
B. Definisi Konsep .....	37
C. Fokus Penelitian .....	38
D. Jenis dan Sumber Data .....	39
E. Informan Penelitian .....	40
F. Teknik Pengumpulan Data .....	41
G. Uji Keabsahan Data .....	42
H. Teknik Analisis Data .....	43
BAB IV .....	46
HASIL DAN PEMBAHASAN .....	46
A. Gambaran Umum Dinas Sosial Kabupaten Ogan Ilir .....	46
1. Visi, Misi, dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Ogan Ilir .....	46

2. Fungsi Dinas Sosial Kab. Ogan Ilir .....	47
3. Struktur Dinas Sosial Kabupaten Ogan Ilir .....	49
B. Gambaran Umum Kecamatan Pemulutan .....	56
1. Kondisi Geografis Kecamatan Pemulutan .....	56
2. Batas Wilayah .....	56
3. Jumlah Penduduk Kecamatan Pemulutan .....	56
4. Mata Pencarian Masyarakat Kecamatan Pemulutan.....	57
C. Hasil .....	58
1. Prinsip Akuntabilitas.....	58
2. Prinsip Transparansi .....	69
BAB V.....	78
PENUTUP.....	78
A. Kesimpulan .....	78
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA .....	81
LAMPIRAN .....	84

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah Kebakaran yang terjadi di Kabupaten Ogan Ilir pada Tahun 2021.....	5
Tabel 2 Jumlah Kebakaran yang terjadi per tiap desa di Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2021 .....	7
Tabel 4 Penelitian Terdahulu.....	19
Tabel 5 Fokus Penelitian.....	27
Tabel 7 Tugas Dinas Sosial Kabupaten Ogan Ilir.....	45
Tabel 8 Spesifikasi Bantuan yang diberikan Dinas Sosial Kabupaten Ogan Ilir.....	61

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Alur Proses Permohonan Bantuan Kebakaran di Dinas Sosial Kabupaten Ogan Ilir.....	6
Gambar 2 Kerangka Pemikiran .....	26
Gambar 3 Gambar Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Ogan Ilir.....	44
Gambar 4 Laporan pertanggungjawaban dalam bentuk Berita Acara dan Rekapitulasi Transaksi Barang Masuk Keluar.....	67
Gambar 5 Permensos No. 9 Tahun 2018 dan Perbup OI No. 27 Tahun 2021.....	67
Gambar 6 Website Resmi dan Akun sosial media Dinas Sosial Kabupaten Batanghari....	71

## DAFTAR SINGKATAN

KK	: Kepala Keluarga
KKN	: Korupsi, Kolusi, Nepotisme
BPBD	: Badan Penanggulangan Bencana Daerah
SPM	: Standar Pelayanan Minimal
UNDP	: <i>United Nation Development Program</i>
BA	: Berita Acara

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1. Surat Tugas Dosen Pembimbing Seminar Usulan Skripsi
- Lampiran 2. Surat Izin Penelitian
- Lampiran 3. Surat Rekomendasi Izin Penelitian
- Lampiran 4. Kartu Bimbingan Seminar Usulan Skripsi
- Lampiran 5. Kartu Perbaikan Seminar Usulan Skripsi
- Lampiran 6. Kartu Bimbingan Skripsi
- Lampiran 7. Kartu Perbaikan Skripsi
- Lampiran 8. Dokumentasi Wawancara
- Lampiran 9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar  
Teknis Pelayanan Minimal Korban Bencana

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pelayanan publik adalah rangkaian kegiatan dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pelayanan publik di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang menjelaskan bahwa pelayanan publik bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan layanan kepada masyarakat selaku pengguna layanan publik. Pentingnya pemenuhan akan asas-asas pelayanan publik seperti tidak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, ketepatan waktu, kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan dalam menjamin kepastian pemberian pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil dari data Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Ombudsman RI yang menjelaskan bahwa lebih dari 50 persen provinsi di Indonesia masih berada pada zonasi kuning. Adanya pelayanan publik yang belum efektif dan efisien memicu terjadinya keresahan masyarakat dan kontroversi yang timbul dalam pelbagai lapisan masyarakat. Semakin berkembangnya zaman dan juga teknologi, pemikiran masyarakat pun ikut menjadi semakin kritis dalam menilai baik buruknya suatu pemerintahan, terkhusus dalam pelayanan publik yang diberikan. Mewujudkan pemerintahan yang efektif sesuai dengan pemerintahan yang baik, diperlukan transparansi dan akuntabilitas dalam penerapannya sehingga pemerintahan yang bertanggungjawab dapat diwujudkan. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, perlunya pengembangan dan juga penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga melahirkan



penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, bahkan bisa bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) baik dalam pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah sekalipun.

Penyelenggaraan pemerintah daerah yang masih mengalami banyak persoalan dan kelemahan, terutama dalam pelayanan publik membuat kesejahteraan sosial belum dapat terjamin sepenuhnya. Adanya penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi yang belum terlaksana dengan baik menjadi salah satu penyebab utama penyelenggaraan pemerintahan daerah yang masih jauh dari kata *good governance* atau pemerintahan yang baik. Pemerintahan yang baik tentunya harus memperhatikan prinsip akuntabilitas dan transparansi sebagai kewajiban dalam mengelola sumber daya publik dan mampu bersikap terbuka dalam hal-hal yang menyangkut pertanggungjawaban anggaran, administrasi, maupun program atau kegiatan yang dilakukan. Adapun pelaksanaan tersebut juga tak hanya didukung oleh peran pemerintah dan masyarakat namun juga peran pihak swasta.

Bentuk pelayanan publik yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah sendiri salah satunya adalah pemberian bantuan kebakaran. Merujuk pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di daerah kabupaten/kota, pada Pasal 5 ayat (1), (2), dan (3) menyebutkan bahwa jenis bencana terdiri atas bencana alam dan bencana sosial. Bencana alam terdiri atas gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, letusan gunung api, gelombang laut ekstrem, angin topan, termasuk siklon tropis/puting beliung, dan atau kekeringan. Adapun bencana sosial terdiri atas kebakaran pemukiman, kebakaran hutan dan lahan, konflik sosial, aksi terror, wabah/pandemi atau gagal teknologi.

Kebakaran merupakan salah satu bencana sosial yang sampai sekarang masih menjadi masalah krusial dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia terutama kebakaran pemukiman. Dalam upaya penanganan korban kebakaran, Menteri Sosial mengeluarkan peraturan yakni Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota berisi 63 Pasal yang mengatur tentang Standar Pelayanan Minimal untuk Korban Bencana, Penyandang Disabilitas, Lanjut Usia, Gelandangan, maupun Anak terlantar. Peraturan ini dibuat sebagai bahan acuan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam menetapkan peraturan daerah mengenai rencana pemenuhan pelayanan dasar pada SPM di daerah provinsi atau kabupaten/kota. Hal tersebut juga bertujuan agar tercapai dan menunjang terlaksananya pelayanan yang prima bagi masyarakat terutama dalam keadaan tanggap darurat seperti bagi korban bencana kebakaran termasuk di Provinsi Sumatera Selatan.

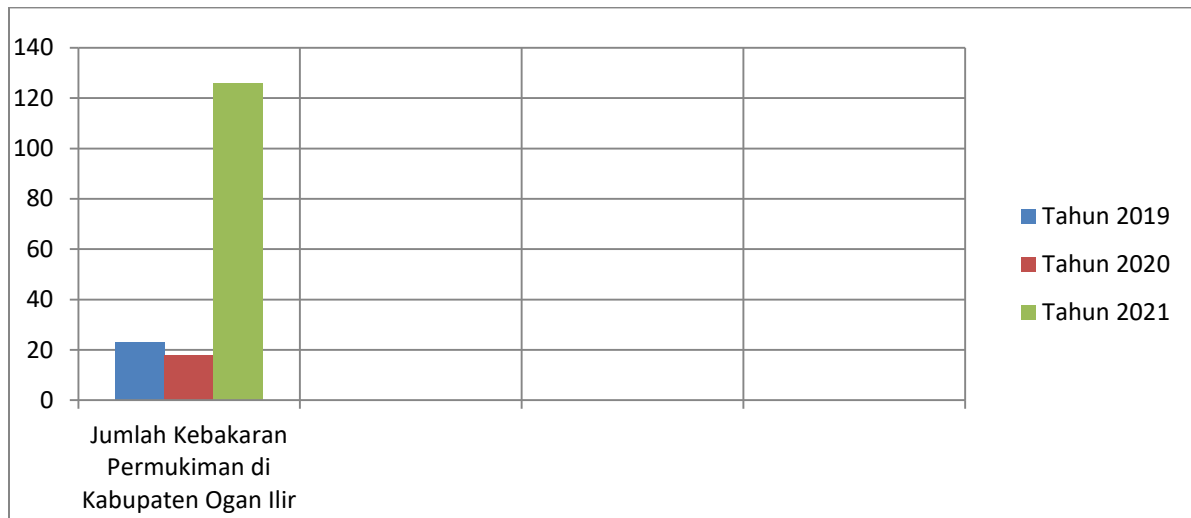
Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Kewenangan Dekonsentrasi dan Penugasan Tugas Pembantuan kepada Dinas Sosial Daerah Provinsi dan Dinas Sosial Kabupaten/Kota tahun anggaran 2020, Dinas Sosial Kabupaten Ogan Ilir termasuk salah satu instansi yang memiliki kewenangan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan bentuk penyaluran bantuan untuk korban Bencana Alam dan Bencana Sosial. Adapun salah satu jenis bencana sosial yang sering terjadi di Kabupaten Ogan Ilir adalah kebakaran permukiman. Adapun kegiatan pemberian bantuan untuk korban kebakaran ini juga turut dibantu oleh Taruna Siaga Bencana (Tagana) Kabupaten Ogan Ilir, yang merupakan sebuah komunitas relawan yang diatur dalam Undang-Undang. Tagana sendiri bertugas untuk membantu Dinas Sosial Kabupaten Ogan Ilir

mendistribusikan bantuan, mengumpulkan informasi daerah-daerah yang terjadi kebakaran rumah, dan hal lainnya yang diperlukan dalam upaya pemberian bantuan kebakaran ini ke masyarakat.

Hal tersebut berbeda dengan kewenangan yang dimiliki oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ogan Ilir. Terkhusus pada bencana kebakaran rumah penduduk maupun bangunan, BPBD akan turut memberikan bantuan apabila ada pengajuan permohonan bantuan dari pihak Dinas Sosial secara langsung. Biasanya, hal tersebut akan dilakukan apabila terjadinya bencana kebakaran dalam skala besar, sehingga membutuhkan bantuan BPBD dalam upaya pemberian bantuan kepada masyarakat atau korban yang terdampak agar tercukupi kebutuhannya. Informasi tersebut diperoleh berdasarkan hasil informasi dari Tenaga Kerja Sosial (TKS) di bidang bantuan dan jaminan sosial.

Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), hingga Oktober 2021 terjadi 138 kali bencana di wilayah provinsi Sumatera Selatan. Dari adanya jumlah tersebut, kebakaran rumah penduduk mendominasi yang tercatat sebanyak 92 kali. Selain itu, bencana angin puting beliung terjadi sebanyak 20 kali, banjir sebanyak 15 kali, dan longsor 6 kali serta banjir bandang 5 kali. Adapun tercatat terjadi peningkatan jumlah kebakaran di Kabupaten Ogan Ilir secara drastis pada tahun 2021 terhitung dari tahun 2019, walaupun sempat terjadi penurunan di tahun 2020 nya. berikut apabila disajikan dalam bentuk diagram.

Gambar 1 Diagram Jumlah Kebakaran Permukiman yang terjadi di Kab. OI tahun 2019-2021.



Sumber: Data diolah penulis dari data milik Dinas Sosial Kab. OI

Sedangkan berdasarkan data yang didapat dari Dinas Sosial Kabupaten Ogan Ilir, untuk jumlah total keseluruhan korban kebakaran permukiman yang terjadi tercatat sebanyak 126 KK (Kepala Keluarga) di Kabupaten Ogan Ilir, dengan fokus jenis pelayanan yang diberikan yakni pada pemberian bantuan sandang dan pangan. Berikut data jumlah kebakaran yang terjadi di per tiap Kecamatan di Kabupaten Ogan Ilir tahun 2021 yang disajikan dalam bentuk tabel.

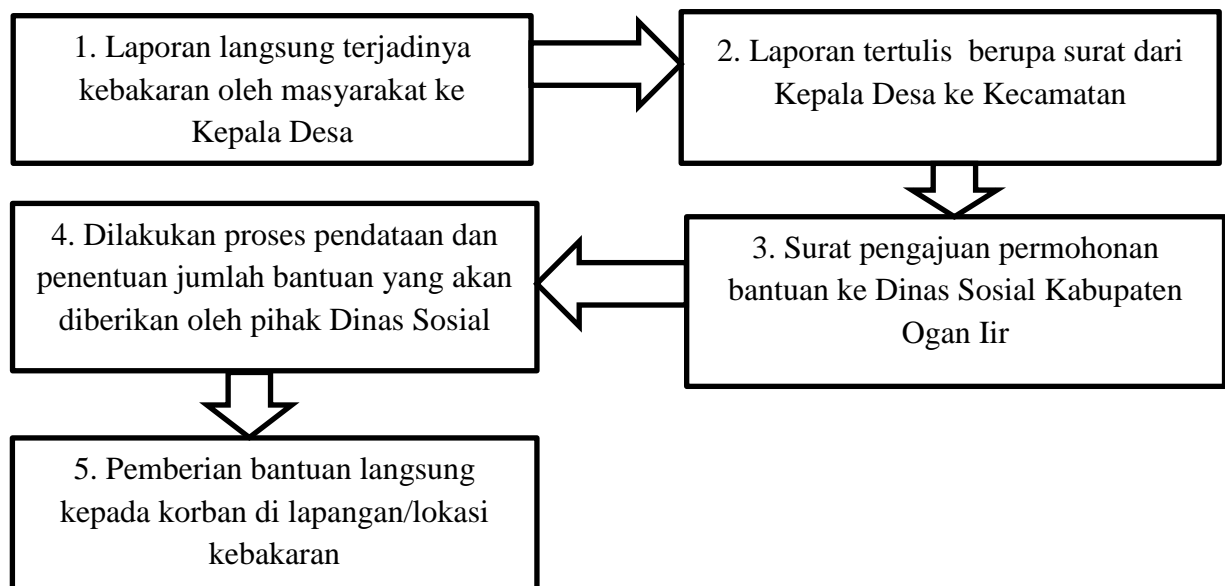
Tabel 1 Jumlah Kebakaran yang terjadi di Kabupaten Ogan Ilir pada Tahun 2021

No.	Nama Kecamatan	Rumah Kebakaran (per KK)
1.	Kecamatan Indralaya	1
2.	Kecamatan Pemulutan Selatan	5
3.	Kecamatan Lubuk Keliat	2
4.	<b>Kecamatan Pemulutan</b>	<b>85</b>
5.	Kecamatan Sungai Pinang	10
6.	Kecamatan Pemulutan Barat	-
7.	Kecamatan Rantau Alai	3
8.	Kecamatan Tanjung Raja	4
9.	Kecamatan Indralaya Selatan	1
10.	Kecamatan Tanjung Batu	10
11.	Kecamatan Rantau Panjang	3
12.	Kecamatan Indralaya Utara	1
13.	Kecamatan Kandis	1
14.	Kecamatan Muara Kuang	-
15.	Kecamatan Payaraman	-
16.	Kecamatan Rambang Kuang	-
<b>JUMLAH TOTAL</b>		<b>126</b>

*Sumber: Data diolah oleh penulis dari data Dinas Sosial Kabupaten Ogan Ilir*

Tenaga Kerja Sosial tersebut juga menjelaskan bahwa alur dari pemberian bantuan kepada korban kebakaran dari Dinas Sosial Kabupaten Ogan Ilir sendiri dimulai dari adanya laporan langsung masyarakat maupun korban ke kepala desa setempat, kemudian diproses menjadi laporan keterangan secara tertulis berupa surat dari Kepala Desa setempat lokasi terjadinya kebakaran, yang kemudian diteruskan ke kecamatan untuk kemudian diproses dan dibuatkan surat permohonan bantuan kepada Dinas Sosial Kabupaten Ogan Ilir. Berikut alur pemberian permohonan pengajuan bantuan kebakaran kepada Dinas Sosial dalam bentuk bagan.

Gambar 2 Alur Proses Permohonan Pengajuan Bantuan Kebakaran di Dinas Sosial Kabupaten Ogan Ilir



*Sumber: Data diolah oleh Penulis*

Kabupaten Ogan Ilir memiliki 227 desa, 14 kelurahan, dan 16 Kecamatan dengan total jumlah penduduk keseluruhannya pada tahun 2021 sebanyak 416.549 jiwa menurut [bps.go.id/oganilir](https://bps.go.id/oganilir), menjadi salah satu kabupaten di Indonesia yang rawan terjadinya bencana sosial yakni jenis kebakaran tiap tahunnya. Kecamatan Pemulutan merupakan kecamatan yang paling rentan mengalami kebakaran yang kerap terjadi di tiap desa yang berbeda dalam kecamatan tersebut. Hal tersebut dibuktikan dari adanya jumlah kasus kebakaran pada tahun 2021 tercatat sebanyak 85 KK dengan kasus Rumah Kebakaran. Berikut penyajian data jumlah kebakaran di Kecamatan Pemulutan dalam bentuk tabel.

Tabel 2 Jumlah Kebakaran yang terjadi per tiap desa di Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2021

<i>Sumber: diolah Dinas</i>	No.	Nama Desa	Jumlah Kebakaran (per Kepala Keluarga (KK))	<i>Data dari data Sosial</i>
	1.	Desa Ibul Besar II	19	
	2.	Desa Ibul Besar III	29	
	3.	Desa Pemulutan Ilir	35	
	4.	Desa Simpang Pelabuhan Dalam	2	
	<b>Total Jumlah</b>		<b>85</b>	

*Kabupaten Ogan Ilir*

Apabila merujuk pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam Pelayanan Korban Bencana yang tercantum pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 pada pasal 15 ayat (2), yang menjadi acuan pemerintahan Kabupaten Ogan Ilir dalam pelaksanaan pelayanan oleh dinas terkait seperti Dinas Sosial, terdapat lima (5) kebutuhan dasar yang seharusnya dipenuhi dalam pelayanan korban bencana alam maupun bencana sosial. Kebutuhan dasar yang dimaksud ialah sebagai berikut:

- a. Permakanan
- b. Sandang
- c. Tempat penampungan pengungsi
- d. Penanganan khusus bagi kelompok rentan

e. Dukungan psikososial.

Hal tersebut kemudian juga didukung dengan adanya peraturan Bupati Ogan Ilir nomor 27 tahun 2020 tentang penerapan Standar Pelayanan Minimal, yang mana pada pasal 10 ayat (3) dijelaskan bahwa yang dapat menerima bantuan tersebut yang dimaksud ialah salah satunya warga negara yang menjadi korban kebakaran atau terdampak kebakaran untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran. Dari adanya kelima kebutuhan dasar yang seharusnya dipenuhi oleh Dinas Sosial Kabupaten Ogan Ilir, ternyata pada kenyataannya dilapangan masih belum terpenuhi secara keseluruhan. Berdasarkan kenyataannya yang terjadi dilapangan, Dinas Sosial Kabupaten Ogan Ilir masih fokus pada pelayanan akan pemenuhan kebutuhan akan permakanan dan sandang saja. Sarana pemberian kritik dan saran dari masyarakat untuk pelayanan korban kebakaran ini juga masih belum tersedia.

Pelaksanaan pemberian bantuan yang belum sesuai lima (5) kebutuhan dasar yang tercantum dala Permensos Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota, dan juga belum tersedianya sarana pemberian aspirasi menjadi permasalahan yang memicu penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam proses pemberian bantuan kebakaran ini belum dapat terlaksana dengan baik secara keseluruhannya.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dikategorikan menjadi tiga (2) pokok permasalahan yang krusial untuk dibahas dan diteliti lebih secara lebih mendalam, yaitu:

1. Pelaksanaan pemberian bantuan kepada korban kebakaran yang masih belum sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) Permensos Nomor 9 Tahun 2018 pada pasal 15



ayat (2), yakni belum memenuhi lima kebutuhan dasar yang seharusnya diberikan dan;

2. Belum tersedianya sarana pemberian kritik dan saran atas pelayanan publik yang diberikan terhadap masyarakat yang menerima bantuan korban kebakaran.

Pemilihan Kecamatan Pemulutan di Kabupaten Ogan Ilir sebagai *locus* penelitian ini dikarenakan kecamatan Pemulutan menjadi daerah dengan jumlah kasus kebakaran terbanyak dengan jumlahnya yakni sebanyak 85 Kepala Keluarga (KK) dari total 126 Kepala Keluarga (KK) untuk kasus Kebakaran di Kabupaten Ogan Ilir. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Penerapan Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pemberian Bantuan Kebakaran Permukiman oleh Dinas Sosial Kabupaten Ogan Ilir di Kecamatan Pemulutan Tahun 2021”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian masalah pada latar belakang, maka masalah yang dibahas adalah bagaimana penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pemberian bantuan kebakaran permukiman oleh Dinas Sosial Kabupaten Ogan Ilir di Kecamatan Pemulutan tahun 2021?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pemberian bantuan kebakaran permukiman oleh Dinas Sosial Kabupaten Ogan Ilir di Kecamatan Pemulutan tahun 2021.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk keperluan teoritis terutama bagi kalangan akademis dan berguna untuk kepentingan yang bersifat teoritis dan praktis yaitu:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan khususnya bidang ilmu administrasi publik dalam kajian manajemen sektor publik.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan pertimbangan dan masukan kepada pihak-pihak yang terkait baik bagi daerah Kecamatan Pemulutan dan pemerintahan Kabupaten Ogan Ilir, dan dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian yang sama atau terkait selanjutnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU:

- Delly, M. (2014). *Birokrasi Pemerintahan*. Alfabeta.
- Dwipayana, A. G. (2003). *Membangun Good Governance di Desa*. IRE Press.
- Dwiyanto, A. (2005). *Mewujudkan Good Governnance melalui Pelayanan Publik*. Gadjah Mada University Press.
- H., N. (2020). *Penelitian Kualitatif*. Wal Ashri Publishing.
- Haris, H. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu Ilmu Sosial : Perpektif Konvensional dan Kontemporer*. Salemba Empat.
- Heridyansyah. (2011). *Kualitas Pelayanan Publik Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasi*. Java Media.
- J., M. L. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Lijan, P. S. (2006). *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan, dan Implementasi*. Bumi Aksara.
- Rahardjo, A. (2011). *Manajemen Pemerintah Daerah*. Graha Ilmu.
- Sedarmayanti. (2009). *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Mandar Maju.
- Sedarmayanti. (2012). *Good Governance : “Kepemerintahan yang Baik Bagian Kedua Edisi Revisi.”* Mandar Maju.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Manajemen*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Suhady, I. (2005). *Dasar-Dasar Good Governance*. Lembaga Administrasi Negara.
- Suyitno. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif (Konsep, Prinsip dan Operasionalnya)*. Akademi Pustaka.
- Widodo, J. (2001). *Good Governance: Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi pada Era*. Insan Cendikia.

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

- Permensos RI. (2018). Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota. 1–33.
- Peraturan Bupati Ogan Ilir Sumatera Selatan Tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif Dan Aman Pada Situasi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kabupaten Ogan Ilir, Pub. L. No. 63 (2020).
- Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif Dan Aman Pada Situasi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Provinsi Sumatera Selatan, Pub. L. No. 40 (2020).
- Surat Edaran Nomor Hk.02.01/Menkes/335/2020 Tentang Protokol Pencegahan Penularan Corona Virus Disease (Covid-19) Di Tempat Kerja Sektor Jasa Dan Perdagangan (Area Publik) Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha, (2020).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, Pub. L. No. Nomor 5038 (2009)

## JURNAL DAN SKRIPSI :

- Amalia, S. (2018). *Reformasi Birokrasi 4.0 : Strategi Menghadapi Revolusi Industri 4.0*. Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja Dan Administrasi Pelayanan Publik, 21(2), 1–18. <https://doi.org/10.31845/jwk.v21i2.133>
- Aprillia, F. (2021). *governance terhadap pelayanan publik di Dinas Pendapatan Daerah Kecamatan Rambang Niru Kabupaten Muara enim*.
- Christover, D., & Publik, P. (2016). *Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik Di Dinas*. 4(4), 1671–1684.
- Febriani, P. wahyu. (2017). *Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Pagerejo Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo Tahun 2016*.
- Hanafi, Y. S., & Rohman, A. (2019). *Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik*. 9, 153–160. Moento, P. A., Firman, F., & Yusuf, A. P. (2019). *Good Governance Dalam Pemerintahan*. Musamus Journal of Public Administration, 1(2), 10–16. <https://doi.org/10.35724/mjpa.v1i2.1985>
- Nasution, S. R. (2018). *Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik Di Kantor Camat Sail Kota Pekanbaru*. Jurnal Niara, 10(2), 72–77. <https://doi.org/10.31849/nia.v10i2.1904>
- Pelayanan, P., Bidang, P., & Di, P. (2013). *Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelaksanaan Pelayanan Publik Bidang Pendidikan Di Kec. Amurang Barat*. Governance,

5(1).

- Prog, M., Ilmu, S., Fispol, P., Penguji, U. K., Skripsi, P., Penguji, S., & Skripsi, P. (2017). *Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik Di Kecamatan Wanea Kota Manado*. Jurnal Eksekutif, 1(1).
- Ramadani, F. N. (2018). *Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) (studi Kasus pada Kantor Kecamatan Rappocini Makasar*. Jurnal Ilmu Administrasi Negara, 1–14.
- Safrijal, Basyah, M. N., & Ali, H. (2016). *Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Oleh Aparatur Pelayanan Publik Di Kecamatan Kluet Utara Aceh Selatan*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah, 1–10, 323–324.
- Sasundame, R. G., Tulusan, F., & Kalangi, J. (2018). *Penerapan Prinsip - Prinsip Good Governance Dalam Pembuatan E ± Ktp Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara*. Jurnal Administrasi Unsrat, 1–18.
- Syairozi, M. I., Pambudy, A. P., & Yaskun, M. (2021). Analisis Penerapan Good Governance Alam Sistem Informasi Keuangan Daerah. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 2(1), 300.
- Tomuka, S. (2013). *Penerapan Prinsip-Prinsip Kecamatan Girian Kota Bitung ( Studi Tentang Pelayanan Akte Jual Beli)*. Politico, 12(1).
- Wulan, S., & Asis, A. (2019). *Analisis Implementasi Good Governance Dalam Pelayanan Publik Di Kecamatan Malunda Kabupaten Majene*: Jurnal Ilmu Pemerintahan. <https://journal.lppm-unasman.ac.id/index.php/mitzal/article/view/417>

#### WEBSITE:

- BPBD. (2018). *Definisi Bencana*. <https://bpbd.grobogan.go.id/Defenisi-Bencana/#:~:text=Korban adalah orang%2Fsekelompok orang,sakit%2C menderita%2C dan mengungsi>.
- Negeri, G. (2020). *50 Pengertian Bencana Menurut Para Ahli Geografi*. <https://geograpik.blogspot.com/2020/02/50-pengertian-bencana-menurut-para-ahli.html>
- Putri, A. S. (2020). *Jenis-Jenis Bencana Alam, Nonalam dan Sosial*. <https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/06/070000069/jenis-jenis-bencana-alam-nonalam-dan-sosial?page=all>